

**PEMBINGKAIAN BERITA HUKUMAN MATI UNTUK KORUPTOR
(Analisis Framing Wacana Hukuman Mati Untuk Koruptor di Tempo.co
Periode 10 – 15 Desember 2019)**

Oleh :

Danang Risdianto, Maya Sekarwangi, Buddy Riyanto

Abstract

December 9, commemorated World Anti-Corruption Day, President Jokowi won the drama stage titled "Achievement Without Corruption" at SMK N 57 Jakarta. Jokowi said that the death penalty for corruptors could be applied if the people wanted. Related to this, of course, received attention from various media. Online media is one of the media that preaches the discourse of death penalty for corruptors, they update the latest news at each meeting. The online media which always preaches the discourse on death penalty for corruptors coherently in every meeting, Tempo.co This study aims to describe how Tempo.co frames the reporting of the death penalty discourse for corruptors. Release of Information about Coverage. Framing analysis was performed using the Zhongdang Pan and Gerald M. Kosicki analysis models using qualitative methods. The object of this research is Tempo.co with the unit of analysis of news related to the discourse of death penalty for corruptors from December 10-15, 2019. The results of the research show that Tempo's framing of the discourse on death penalty for corruptors puts forward not - disliked, because the death penalty would otherwise keep Indonesia from a more humane civilization.

Keyword : *framing analysis, death sentence for corruptors, Tempo.co*

Pendahuluan

Di Tahun 2018, Lembaga swadaya masyarakat bidang pemantauan dan pemberantasan korupsi atau Indonesia Corruption Watch (ICW) mendapati kasus korupsi sejumlah 1.053 perkara dengan 1.162 terdakwa. Namun putusan terdakwa perkara tindak pidana korupsi tahun 2018 rata - rata hanya divonis selama 2 tahun 5 bulan. Dan mayoritas hukuman untuk perkara korupsi masih tergolong ringan, (Rachman, Kompas.com., 2019).

Melihat masih kurang tegasnya hukum di Indonesia dalam memberikan hukuman untuk koruptor, Haley Hermansyah selaku siswa kelas XII jurusan Tata Boga di SMKN 57 Jakarta

memberanikan dirinya untuk bertanya kepada Jokowi.

Jokowi langsung menjawabnya, "Ya kalau di undang-undangnya memang ada yang korupsi dihukum mati itu akan dilakukan. Tapi, di UU tidak ada yang korupsi dihukum mati," "Itu yang pertama kehendak masyarakat, kalau masyarakat berkehendak seperti itu dalam rancangan UU pidana tipikor, itu (bisa) dimasukkan," kata Jokowi, (Maliana, Tribunnews.com., 2019).

Berawal dari jawaban Jokowi atas pertanyaan siswa SMK N 57 Jakarta, wacana hukuman mati untuk koruptor tentu saja mendapat perhatian

dari berbagai media, baik media cetak sampai media elektronik bahkan media Online. Karena hukuman mati untuk koruptor sebenarnya cerita lama dan hanya menjadi wacana saja. Padahal hukuman mati sudah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat 2 menjelaskan bahwa dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan, (Antara, mediaindonesia.com., 2019).

Adapun fokus pemberitaan yang disajikan dari berbagai media saat itu kebanyakan pro dan kontra dari para tokoh politik sampai pakar hukum terhadap wacana hukuman mati untuk koruptor.

Setiap media mempunyai cara pandang tersendiri dalam mengemas sebuah peristiwa yang sama. Mengenai wacana hukuman mati untuk koruptor yang diungkapkan Jokowi, Tempo.co lebih berani menampilkan berita kritikan kepada Jokowi mengenai wacana hukuman mati untuk koruptor dan Tempo.co lebih banyak menampilkan berita penolakan terhadap wacana hukuman mati untuk koruptor.

Dalam kurun waktu 5 hari (tanggal 10 – 15 Desember 2019), Tempo.co telah memberitakan wacana hukuman mati untuk koruptor sebanyak 20 berita. Dari 20 berita tersebut akan berpotensi menimbulkan opini publik yang majemuk mengenai wacana hukuman mati untuk koruptor. Karena pemberitaan yang dimuat oleh Tempo.co nampak berbeda dari media online lainnya, Tempo.co tidak berimbang dalam memberitakan wacana

hukuman mati untuk koruptor atau lebih banyak memberitakan penolakan terhadap wacana hukuman mati untuk koruptor dan lebih berani menampilkan berita kritikan terhadap Jokowi. Dengan dasar tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti Tempo.co dalam membingkai berita wacana hukuman mati untuk koruptor.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek yang alamiah atau apa adanya tidak dimanipulasi peneliti, dimana peneliti sebagai instrumen yang berperan penting, (Sugiyono, 2016: 9). Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana pembingkai berita wacana hukuman mati untuk koruptor di Tempo.co, peneliti menggunakan analisis framing. Analisis framing yang digunakan adalah model framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Objek dari penelitian ini adalah Tempo.co, sedangkan unit yang akan dianalisis adalah berita-berita dalam Tempo.co mengenai wacana hukuman mati untuk koruptor periode 10 – 15 Desember 2019. Pemilihan periode 10 - 15 Desember 2019 dikarenakan Tempo.co hanya memberitakan wacana hukuman mati untuk koruptor di periode tersebut saja. Dan selama periode tersebut, Tempo.co telah menerbitkan berita sebanyak 20 berita terkait wacana hukuman mati untuk koruptor. Namun berita yang akan dianalisis hanya sebanyak 8 berita

dengan menggunakan tehnik random sampling.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan informasi yang dilakukan dengan mempelajari dokumen – dokumen seperti buku, dokumen, arsip, tulisan angka dan gambar berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Selain itu, peneliti menggunakan teknik observasi (teknik pengamatan). Artinya peneliti melakukan pengamatan setelah data terkumpul, (Sugiyono, 2016: 240). Pengamatan dokumen yang dipelajari adalah teks berita mengenai wacana hukuman mati untuk koruptor di Tempo periode 10 – 15 Desember 2019.

Teknik analisa data yang digunakan peneliti untuk menganalisa teks berita Tempo.co adalah dengan menggunakan analisis framing yang dikembangkan oleh Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki. Menurut Eriyanto (2011: 293), perangkat framing model Zhongdang Pan dan Gerald M.Kosicki dibagi menjadi empat struktur besar, yaitu:

1. Struktur Sintaksis

Merupakan susunan kata atau frase dalam kalimat. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dan bagian berita headline, *lead*, latar informasi, sumber, penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Dengan kata lain struktur sintaksis berhubungan dengan bagaimana wartawan menyusun berita.

2. Struktur Skrip

Merupakan cara wartawan mengisahkan fakta atau bagaimana wartawan menceritakan peristiwa ke dalam berita. Sktruktur skrip mengfokuskan perangkat framing pada kelengkapan berita *yaitu what, when, who, where, why, how.*

3. Struktur Tematik

Merupakan cara wartawan menuliskan fakta atau bagaimana wartawan mengungkapkan pandangannya atas peristiwa ke dalam proposisi, kalimat atau antar hubungan kalimat yang membentuk teks secara keseluruhan. Struktur Tematik mempunyai perangkat framing antara lain Detail, Koherensi, Bentuk kalimat, kata ganti.

4. Struktur Retoris

Merupakan cara wartawan menekankan fakta, bagaimana menekankan arti tertentu dalam suatu berita. Struktur retorisi mempunyai perangkat framing Leksion (pilihan kata), Grafis, Metafora, pangandaian (kata, idiom, gambar / foto, dan grafis).

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Penelitian ini menganalisa 8 berita dari Tempo.co terkait wacana hukuman mati untuk koruptor periode 10 – 15 Desember 2019. Kedelapan berita tersebut dianalisis menggunakan analisis framing model Zhongdang Pan dan Gerald M. Kosicki.

Pada berita 10 Desember 2019 dengan judul “Pengamat: Hukuman Mati untuk Koruptor Kurang Tepat”, hukuman mati untuk koruptor di konstruksi Tempo.co sebagai bentuk

hukuman yang menyalahi aturan Konstitusi dan teks berita 1 menampilkan pilihan hukuman yang dapat membuat jera pelaku korupsi selain hukuman mati. Hal tersebut sengaja digunakan Tempo.co untuk menggiring opini pembaca agar menghindari pandangannya terhadap hukuman mati.

Pada berita tanggal 10 Desember 2019 dengan judul “ICJR Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor Tak Akan Efektif, Mengapa?”, dari judul sudah dapat meyakinkan pembaca bahwa penerapan hukuman mati untuk koruptor tidak akan membawa hasil bagi Indonesia. Seperti data yang dipakai sumber menjelaskan Cina telah menerapkan hukuman mati untuk koruptor namun angka Indeks Persepsi Korupsinya pada tahun 2015 – 2018 tidak jauh berbeda dengan Indeks Persepsi Korupsi milik Indonesia. Selain itu Tempo.co mencoba menggiring opini pembaca bahwa Indonesia tidak perlu menerapkan hukuman mati untuk koruptor, justru melakukan upaya pencegahan dengan mereformasi sistem pemerintahan dan penegakan hukum agar lebih transparan dan akuntabel.

Pada berita tanggal 10 Desember 2019 dengan judul “Soal Hukuman Mati, Ini Kata Marzuki Darusman”, Tempo.co mbingkai hukuman mati untuk koruptor sebagai hukuman yang kejam dan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Hal tersebut terdapat pada pernyataan dari sumber bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak untuk hidup, bahkan negara pun tidak bisa

memperlakukan hukuman mati kepada warga negaranya, sehingga harus mencari cara lain untuk menghukumnya. Selain itu Tempo.co juga melakukan penekanan kontradiksi terhadap hukuman mati untuk koruptor yang seharusnya itu urusan hakim dan jaksa bukan kewenangan Presiden. Serta pengulangan penggunaan kata “hak untuk hidup” pada teks berita sebelumnya. Kata tersebut terdapat dalam kalimat, *Kalau dalam Undang-Undang Dasar 1945 mengakui hak hidup, bahkan negara pun tidak bisa memperlakukan hukuman mati kepada warga negaranya*. Makna dari kalimat tersebut adalah negara tidak bisa menghukum mati warga negaranya, karena hak untuk hidup setiap warga negara diakui di dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Pada berita tanggal 10 Desember 2019 dengan judul “Tak Sepakati Hukuman Mati, ICW: Banyak Cara Buat Jera Koruptor”, dari judul sudah dapat meyakinkan pembaca bahwa hukuman mati bukan pilihan terakhir untuk membuat jera pelaku korupsi. Mengetahui hal ini, Indonesia masih punya banyak cara untuk memberikan efek jera pada pelaku korupsi tanpa harus menerapkan hukuman mati. Sehingga Tempo.co berusaha menggiring opini pembaca dengan memberikan pilihan hukuman yang dapat memberikan efek jera selain hukuman mati. Seperti yang ditulis pada paragraf 2, bahwa masih banyak cara untuk memberikan efek jera misalnya dengan memiskinkan koruptor, memberikan vonis penjara maksimal, pencabutan hak politik, dan lain-lain.

Pada berita tanggal 10 Desember 2019 dengan judul “Komnas HAM Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor”, Tempo.co berusaha membuat frame dalam teks berita ini. Tempo.co membingkai hukuman mati untuk koruptor sebagai kebijakan yang menimbulkan masalah baru. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan sumber bahwa hukuman mati untuk koruptor disebut tidak menyelesaikan persoalan, justru hanya akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi. Dan Tempo.co mencoba menggiring opini pembaca bahwa masih ada sisi kehidupan yang harus diperjuangkan yaitu hak untuk hidup adalah hak asasi yang absolut, sehingga sistem hukum di Indonesia harus meninggalkan hukuman mati.

Pada berita tanggal 12 Desember 2019 dengan judul “Soal Hukuman Mati Koruptor, Buya Syafii: Tiru Cina”, Tempo.co membingkai hukuman mati untuk koruptor sebagai sesuatu hal yang harus dipertimbangkan baik dari sisi hukum maupun sisi keadilan dan Tempo.co mencoba menggiring opini pembaca bahwa masih ada sisi kehidupan yang harus diperjuangkan dalam menerapkan hukuman mati untuk koruptor yaitu hak untuk hidup adalah hak asasi yang absolut.

Pada berita tanggal 13 Desember 2019 dengan judul “Negara-negara yang Menerapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor”, kesimpulan dari berita tersebut adalah Tempo.co membingkai hukuman mati untuk koruptor di Indonesia sebagai bentuk

pelanggaran HAM. Terbukti dengan Tempo.co menampilkan kembali pernyataan dari Komnas HAM yang menyebutkan tidak sepakat dengan hukuman mati bagi koruptor atau pelaku kejahatan lainnya, karena hak asasi manusia adalah absolut.

Pada berita tanggal 15 Desember 2019 dengan judul “Saut KPK Jelaskan Mengapa Menolak Wacana Hukuman Mati Koruptor”, Tempo.co berusaha menggiring opini pembaca untuk tidak setuju terhadap wacana hukuman mati bagi koruptor, karena Tempo.co membingkainya sebagai bentuk hukuman yang tidak membawa pengaruh terhadap pemberantasan kasus korupsi di suatu negara.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada berita-berita di Tempo.co periode 10 – 15 Desember 2019 terkait wacana hukuman mati untuk koruptor, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tempo.co sebagai media yang memiliki akar ideologi humanisme selalu mengedepankan unsur – unsur kemanusiaan dalam membingkai berita kasus tersebut. Tempo.co cenderung menolak atau menentang wacana hukuman mati untuk koruptor dengan alasan hak untuk hidup adalah hak yang absolut. Tempo.co lebih menonjolkan hukuman mati untuk koruptor sebagai ancaman serius bagi negara, karena berlawanan dengan Konstitusi dan hukuman mati justru akan menjauhkan Indonesia dari peradaban kemanusiaan yang lebih manusiawi. Bahkan wacana hukuman mati untuk koruptor dianggap

tidak akan menyelesaikan masalah korupsi di Indonesia. Pemberitaan Tempo.co terkesan selalu mendorong dan meminta Pemerintah Indonesia untuk menghindari wacana hukuman mati terhadap pelaku kejahatan termasuk koruptor dan meminta Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpu Undang – Undang KPK.

Daftar Pustaka

- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara
- Kompas.com. 2019. *ICW: Tahun 2018, Rata-rata Vonis Koruptor 2 Tahun 5 Bulan*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/17302541/icw-tahun-2018-rata-rata-vonis-koruptor-2-tahun-5-bulan>. Diakses 24 Desember 2019 pukul 10.00
- Mediaindonesia.com. 2019. *KPK: Wacana Hukuman Mati Koruptor Cerita Lama*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/276898-kpk-wacana-hukuman-mati-koruptor-cerita-lama>. Diakses 11 Februari 2020 pukul 05.02
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta
- Tribunnews.com. 2019. *Jokowi Beri Komentar Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor, Ini Tanggapan Ahli Hukum*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/10/jokowiberi-komentar-soal-hukuman-mati-bagi-koruptor-ini-tanggapan-ahli-hukum?page=all>. Diakses 21 Januari 2020 pukul 20.54
- Alenia.id. 2019. *Retorika basi hukuman mati dan inkonsistensi pemberantasan korupsi*. <https://www.alinea.id/nasional/retorika-hukuman-mati-dan-inkonsistensi-berantasan-korupsi-b1Xr89pWf>. Diakses 31/1/2020 22.04
- Databoks.katadata.co.id. 2019. *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018 Naik 1 Poin Menjadi 38*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-2018-naik-1-poin-menjadi-38>. Diakses 23/12/2019; 10.04
- Dewi Karyaningsih, Ponco. 2018. *Ilmu Komunikasi*. Yogyakarta: Samudra Biru
- Eriyanto. 2011. *Analisis Framing: Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*. Yogyakarta: LkiS Pelangi Aksara
- Lingga, Murti Ali dan Syam, Hamdani M. (2018). *Analisis Framing Pemberitaan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) Pada Media Online Republika.co.id dan Tempo.co*. Universitas Syiah Kuala, e-Jurnal FISIP, Vol.3, No. 1. <http://www.jim.unsyiah.ac.id/FISI/article/view/6567/2697>. Diakses 12/02/2020; 12.24
- Liputan6.com. 2019. *Mereka yang Menolak Hukuman Mati bagi Koruptor*. <https://www.liputan6.com/news/re>

- [ad/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati-bagi-koruptor](https://www.kpk.go.id/4136531/mereka-yang-menolak-hukuman-mati-bagi-koruptor). Diakses 14/02/2020; 20.23
- Kpk.go.id. 2019. *Statistik TPK Berdasarkan Profesi / Jabatan*. <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-profesi-jabatan>. Diakses 24/12/2019; 09.36
- Kompas.com. 2019. *ICW: Tahun 2018, Rata-rata Vonis Koruptor 2 Tahun 5 Bulan*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/17302541/icw-tahun-2018-rata-rata-vonis-koruptor-2-tahun-5-bulan>. Diakses 24/12/2019; 10.00
- Kompas.com. 2019. *Pro Kontra Pernyataan Jokowi bahwa Koruptor Bisa Dihukum Mati*. <https://nasional.kompas.com/read/2019/12/11/08271531/pro-kontra-pernyataan-jokowi-bahwa-koruptor-bisa-dihukum-mati?page=all>. Diakses 24/12/2019; 13.35
- Malik, Rivaldy Syah. 2016. *Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Anggota TNI Inisial (Mai) Ditinjau Dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia*. Universitas Pasundan, e-Jurnal Ilmu Hukum, <http://repository.unpas.ac.id/12209/4/BAB%20II.pdf>. Diakses 13/02/2020; 10.36
- Manurung, Sonata Batoan Sepahputra. 2015. *Analisis Framing Pemberitaan Bakso Oplosan Pada Portal Berita Republika online dan Kompas.com*. Universitas Mulawarman, e-Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 3, No. 1. [https://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/03/JURNAL%20\(03-03-15-02-19-02\).pdf](https://ejournal.ilkom.fisipunmul.ac.id/site/wpcontent/uploads/2015/03/JURNAL%20(03-03-15-02-19-02).pdf). Diakses pada 7/1/2020; 13.12
- Mediaindonesia.com. 2019. *KPK: Wacana Hukuman Mati Koruptor Cerita Lama*. <https://mediaindonesia.com/read/detail/276898-kpk-wacana-hukuman-mati-koruptor-cerita-lama>. Diakses 11/2/2020; 05.02
- Nurfadila, Dila. 2017. *Analisis Framing pemberitaan dugaan penistaan agama oleh Ahok di media online kompas.com dan republika.c.id*. UIN sunan Gunung Djati, e-Jurnal UINSGD. http://digilib.uinsgd.ac.id/11128/6/5_bab2.pdf. Diakses 5/2/2020; 21.33
- Nurdin, Burhan Taqwin. 2018. *Kontruksi Pemberitaan Korupsi E-KTP Ganjar Pranowo di Media Online Tribunnnews.Com dan Detiknews.Com Periode Januari – Februari 2018*. Universitas Muhammadiyah Surakarta, e-Jurnal Ilmu Komunikasi. <http://eprints.ums.ac.id/66675/2/BURHAN%20TAQWIN%20NURDIN%20%28L100110044%29%2016-08-2018.pdf>. Diakses 11/1/2020; 15.48
- Romli, Asep Samsyul M. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*. Bandung: Nuansa Cendekia.

- Romli, Khomsahrial. 2016. *Komunikasi Massa*. Jakarta: PT Grasindo anggota Ikapi
- Suprobo, T., dkk. 2016. *Analisis Framing Media Online dalam Pemberitaan Profil dan Kebijakan Menteri Susi Pudjiastuti*. Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga, e-Jurnal Cakrawala, Vol. 5, No. 1. <https://ejournal.uksw.edu/cakrawala/article/view/499/333>. Diakses 26/12/2019; 11.19
- Suara.com. 2019. *Anak SMK Tanya ke Jokowi: Mengapa Gak Berani Hukum Mati Koruptor?* <https://www.suara.com/news/2019/12/09/123035/anak-smk-tanya-ke-jokowi-mengapa-gak-berani-hukum-mati-koruptor>. Diakses pada 24/12/2019; 14.00
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B*. Bandung: Alfabeta
- Tempo.co. 2019. *ICJR Sebut Hukuman Mati bagi Koruptor Tak Akan Efektif, Mengapa?* <https://nasional.tempo.co/read/1282053/icjr-sebut-hukuman-mati-bagi-koruptor-tak-akan-efektif-mengapa>. Diakses pada 25/1/2020; 22.20
- Tempo.co. 2019. *Komnas HAM Tak Sepakat Hukuman Mati Koruptor*. <https://nasional.tempo.co/read/1282293/komnas-ham-tak-sepakat-hukuman-mati-koruptor>. Diakses 25/1/2020; 19.49
- Tempo.co. 2019. *Negara-negara yang Menerapkan Hukuman Mati Bagi Koruptor*. <https://dunia.tempo.co/read/1283391/negara-negara-yang-menerapkan-hukuman-mati-bagi-koruptor>. Diakses 25/1/2020; 20.20
- Tempo.co. 2019. *Pengamat: Hukuman Mati untuk Koruptor Kurang Tepat*. <https://nasional.tempo.co/read/1282011/pengamat-hukuman-mati-untuk-koruptor-kurang-tepat>. Diakses pada 25/1/2020; 19.15
- Tempo.co. 2019. *PKS Kritik Pedas Jokowi Soal Hukuman Mati bagi Koruptor*. <https://nasional.tempo.co/read/1282095/pks-kritik-pedas-jokowi-soal-hukuman-mati-bagi-koruptor>. Diakses 24/1/2020; 11.36
- Tempo.co. 2019. *Saut KPK Jelaskan Mengapa Menolak Wacana Hukuman Mati Koruptor*. <https://nasional.tempo.co/read/1283924/saut-kpk-jelaskan-mengapa-menolak-wacana-hukuman-mati-koruptor>. Diakses 24/1/2020; 11.29
- Tempo.co. 2019. *Soal Hukuman Mati Koruptor, Buya Syafii: Tiru Cina*. <https://nasional.tempo.co/read/1283027/soal-hukuman-mati-koruptor-buya-syafii-tiru-cina>. Diakses 24/1/2019; 21.16
- Tempo.co. 2019. *Soal Hukuman Mati, Ini Kata Marzuki Darusman*. <https://nasional.tempo.co/read/1282224/soal-hukuman-mati-ini-kata-marzuki-darusman>. Diakses 25/1/2020; 15.20

- Tempo.co. 2019. *Tak Sepakati Hukuman Mati, ICW: Banyak Cara Buat Jera Koruptor*. <https://nasional.tempo.co/read/1282282/tak-sepakati-hukuman-mati-icw-banyak-cara-buat-jera-koruptor>. Diakses 26/02/2020; 21.12
- Tempo.co. Tentang kami. Sejarah tempo, <https://korporat.tempo.co/tentang/sejarah>. Diakses 29/1/2020; 11.55
- Tempo.co. TentangKami, <https://www.tempo.co/about>. Diakses 24/1/2020; 14.12
- Tempo.co. 2019. *Wacana Hukuman Mati Koruptor, Ganjar: Harus Dibahas Matang*. <https://nasional.tempo.co/read/1282038/wacana-hukuman-mati-koruptor-ganjar-harus-dibahas-matang>. Diakses 25/1/2020; 21.02
- Tribunnews.com. 2019. *Ma'ruf Amin Dukung Wacana Jokowi Hukum Mati Koruptor: Jika Dihukum Mati Saja Tak Jera, Apalagi Tidak*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/12/maruf-amin-dukung-wacana-jokowi-hukum-mati-koruptor-jika-dihukum-mati-saja-tak-jera-apalagi-tidak?page=2>. Diakses 23/1/2020; 09.01
- Tribunnews.com. 2019. *Jokowi Beri Komentar Soal Hukuman Mati Bagi Koruptor, Ini Tanggapan Ahli Hukum*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2019/12/10/jokowiberi-komentar-soal-hukuman-mati-bagi-koruptor-ini-tanggapan-ahli-hukum?page=all>. Diakses 21/1/2020; 20.54
- Yudha, I Gede Dharma. 2014. *Studi Komparatif Tingkat Kepuasan Pembaca Radar Lampung Dan Tribun Lampung*. Universitas Lampung, e-Jurnal UNILA. <http://digilib.unila.ac.id/5260/13/Bab%20II.pdf>. Diakses 05/2/2020; 9.59
- Yuliarti, Astinana,. Dkk. 2017. *Isis Dan Stigma Islamofobia Framing Tentang Konstruksi Pemberitaan Isis Dalam Media Online*. Universitas Hasanuddin, e-Jurnal Komunikasi KAREBA, Vol. 6, No. 2. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/kareba/article/download/5329/2884>. Diakses 14/02/2020; 21.04